

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-6
Senang Jadi Siswa	7-8
Pengantar	9-12

SAJIAN KHUSUS

Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi <i>Nurcholish Madjid</i>	15-30
Nurcholish Madjid dan Akar Religius "Masyarakat Warga" <i>F. Budi Hardiman</i>	31-51
Masyarakat Madani: Bingkai Keadaban bagi Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik <i>Syamsul Arifin</i>	53-71

ARTIKEL

Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam <i>Ahmad Syafii Maarif</i>	75-87
Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia: Persoalan Definisi dan Pelembagaan <i>Masdar Hilmy</i>	89-106

DAFTAR ISI

Memaknai Keindonesiaan dalam Perspektif Politik Keragaman <i>Airlangga Pribadi</i>	107-125
Aliran-aliran Islam Kontemporer <i>Kautsar Azhari Noer</i>	127-151
Mencoba Menangkap Ruh al-Qur'an <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	153-176
Eksplorasi ke Dunia Fisik: Risiko-risiko dan Solusinya <i>Andy Setiawan</i>	177-183
Tuhan adalah Kedamaian <i>Baba Hari Daas</i>	185-188

RESENSI BUKU

Islam Radikal: Mengubur Hidup-hidup Demokrasi <i>Okky Tirtoadhissoerjo</i>	191-195
---	---------

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	199-200
Ucapan Terima Kasih	201

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI ERA REFORMASI

Nurcholish Madjid

Tampaknya berbagai gagasan, lembaga, dan upaya dalam bentuk apapun yang menyertai dan mengambil bagian dalam pengembangan wawasan-wawasan reformasi guna mewujudkan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis mesti terus digalakkan dan dikembangkan secara lebih maksimal. Dalam hal ini, sebenarnya wawasan-wawasan berkenaan dengan hal ini telah digagas dan mulai dikembangkan jauh lebih dahulu sebelum era reformasi tahun 1998. Sejak awal 1970, pengembangan wawasan-wawasan reformasi tersebut telah mulai dibincangkan, diperdebatkan dan dikaji secara lebih mendalam. Dan sebagai usaha melembagakan gerakan 1970-an itu, pada 1986 dibentuk Yayasan Wakaf Paramadina. Nama yang dengan penuh pertimbangan dipilih untuk lembaga itu sudah dengan padat dan simbolik menunjukkan maksud dan tujuannya, yaitu menggali kembali dan mengembangkan pengertian yang benar tentang inti utama ajaran agama (“parama-dina”). Inti utama ajaran agama itu diyakini sebagai ajaran hidup kemanusiaan universal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana telah disampaikan para nabi dan rasul yang telah diutus Tuhan untuk setiap umat. Ajaran universal itu merupakan wujud rahmat Tuhan kepada seluruh alam, dan menjadi ajaran kesamaan (*kalimah sawād*) atau titik-temu semua agama (Q, 3:64).

Dalam Kitab Suci juga disebutkan bahwa ajaran universal itu adalah jalan hidup atau *Syari'ah* yang diajarkan dalam semua agama,

sama seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada Nabi Nuh dan Nabi Muhammad, serta kepada Nabi-Nabi Ibrahim, Musa dan Isa; karena itu ajaran kepatuhan kepada Tuhan harus ditegakkan, dan umat manusia tidak dibenarkan bertikai dalam ajaran itu, suatu hal yang amat berat dan sulit dipahami oleh mereka yang tidak berpaham Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tauhid, yaitu kaum musyrik (Q, 42:13). Untuk dapat menangkap ruh ajaran universal itu manusia harus beriman kepada semua kitab suci dan semua nabi dan rasul, tanpa membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, yang semuanya adalah “orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan” (“muslimun” [*muslimūn*, bentuk plural dari *muslim*]) (Q, 2:136) dalam semangat kedamaian (*salām*). Al-Qur'an menegaskan bahwa para pengikut semua nabi dan rasul adalah umat yang tunggal dan semua mereka tidak menyembah kecuali Tuhan Yang Maha Esa (Q, 21:92). Maka diingatkan agar kita tidak bertikai dengan para pengikut kitab suci, kecuali terhadap yang zalim dari kalangau mereka. Kita diwajibkan percaya kepada ajaran semua kitab suci itu, sebab Tuhan bagi semuanya adalah Tuhan yang sama, Yang Maha Esa, dan semuanya adalah orang-orang yang ber-*islām*, tunduk-patuhan kepada Tuhan (Q, 29:46) dalam semangat kedamaian, yaitu *salām*.

Nabi Muhammad *saw* juga menegaskan bahwa agama para nabi itu satu dan sama. Dan para nabi adalah “bersaudara tunggal bapak lain ibu itu” (Hadis). Mereka berpijak pada ajaran pokok yang sama. sekalipun mungkin berbeda-beda dalam jalan dan cara pelaksanaan ajaran pokok itu, sesuai dengan tuntutan khusus ruang dan waktu. Karena itu Kitab Suci juga menegaskan bahwa Tuhan telah menetapkan *syir'ah* (jalan) dan *minhāj* (cara) yang berbeda-beda untuk setiap golongan umat manusia, yang tidak dibenarkan menjadi bahan pertikaian, tapi justru harus mendorong perlombaan menuju kepada berbagai kebaikan. Wewenang untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan itu di antara manusia hanya ada pada Tuhan kelak jika umat manusia telah kembali kepada-Nya (Q, 5:48). Masing-masing golongan, dalam semangat kerinduannya kepada sentralitas, mempunyai arah sendiri ke mana mereka menghadap, yang semua itu juga tidak perlu menjadi bahan pertengkarhan, me-

lainkan hendaknya juga menjadi pendorong terjadinya perlombaan menuju kepada berbagai kebaikan (Q, 2:148). Tuhan adalah Pemilik timur dan barat, Penilik dua timur dan dua barat, Pemilik semua timur dan semua barat, yakni, Pemilik segenap penjuru angin, sehingga ke manapun kita menghadap di sana ada Wajah Tuhan (Q, 2:115, 142; 55:17; 70:40). Dan kebajikan tidaklah berupa sikap menghadap ke timur ataupun ke barat dalam sikap kesalehan lahir, melainkan ada dalam tindakan dan amal nyata, dimulai dengan keimanan kepada Tuhan sebagai dasar dan pangkal tolak, diteruskan kepada keteguhan menepati janji antara sesama manusia, dan ketabahan hati dan jiwa dalam menempuh jalan hidup yang sulit, yang penuh dengan tantangan dan rintangan (Q, 2:177).

Kita semua meyakini adanya inti ajaran universal itu. Kita semua berpegang kepada petunjuk Tuhan bahwa kita harus beriman kepada semua kitab suci dan kepada semua nabi yang telah diangkat Tuhan pada setiap umat (Q, 16:36). Kita beriman kepada kitab suci manapun juga, yang semua para pengikut agama itu harus diperlakukan secara adil, sebab pada dasarnya semua mereka itu menyembah Tuhan yang sama, dengan masing-masing bertanggung jawab atas amal-perbuatan mereka sendiri yang tidak perlu menjadi bahan pertengkar, karena kelak kita sekalian akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menentukan benar-salah serta baik-buruk segala amal-perbuatan itu (Q, 42:15). Karena itu kita percaya bahwa kearifan ada di mana-mana, dan kita harus mencarinya “meskipun ke Negeri Cina” (Hadis).

Sebagai suri teladan umat manusia, Nabi Muhammad *saw* telah memberi contoh bagaimana mewujudkan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersambungan langsung dengan wawasan sosial keagamaan dan politik yang berjiwa paham kemajemukan (pluralis) dan yang serba meliputi (inklusif) itu dalam Masyarakat Madinah. Sebagai yang terakhir dan yang menutup deretan panjang para pembawa ajaran Ilahi untuk umat manusia, Nabi Muhammad *saw* dengan Madinah-nya telah mewariskan suatu model bagaimana mengatur masyarakat serta menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan yang benar-benar

secara utuh memenuhi dambaan lahir dan batin manusia: tidak lahir saja seperti yang sedang kita rasakan di zaman yang menurut Rene Guenon ('Abd al-Wahid Yahya) terbelenggu oleh "kedaulatan kuantitas" sekarang ini tapi juga tidak batin saja dengan melupakan yang lahir, suatu pandangan hidup yang tidak adil kepada fitrah diri manusia sendiri dan tidak sejalan dengan kebaikan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam keutuhan jiwa-raga, lahir-batin.

Sebagai model penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan, Madinah Nabi itu dalam penilaian Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi modern dengan otoritas yang sangat tinggi, merupakan model yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya. Masyarakat Madinah itu sangat modern dilihat dari tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi seluruh jenjang anggota masyarakat. Masyarakat Madinah itu juga modern karena kedudukan kepemimpinannya yang terbuka untuk kemampuan yang diuji atas dasar pertimbangan universal dan dilambangkan dalam percobaan melembagakan kepemimpinan tertinggi yang tidak berdasarkan keturunan.

Sayang sekali masyarakat Madinah itu tidak bertahan lama, sebab saat itu, menurut Bellah, belum ada prasarana sosial dan kultural untuk menopangnya. *It was too modern to succeed*, kata Bellah. Pelembagaan kepemimpinan tertinggi berdasarkan pemilihan (umum) berhenti sekitar 40 tahun setelah wafat Nabi, karena Khalifah Mu'awiyah yang menjalankan kekuasaan dari Damaskus pada tahun 51 Hijriah menunjuk anaknya sendiri, Yazid, sebagai pengganti. Meskipun ditentang oleh para pemuka masyarakat di Madinah dan Makkah sebagai tradisi kaisar Romawi dan khusro Persi yang bertentangan dengan tradisi Nabi dan para Khalifah Rasyidun, namun Mu'awiyah berjalan terus dengan keputusannya, dengan mengandalkan kekuatan fisik militer. Dunia Islam mengalami perubahan fundamental dari masyarakat yang menempatkan pemimpin tertinggi melalui pemilihan menjadi masyarakat yang mengenal hanya kekuasaan dinasti genealogis, kepemimpinan berdasarkan pertalian darah. Sejak itu sumber utama legitimasi politik ialah keturunan, dan masyarakat tanpa sadar menyimpang

dari salah satu prinsip sosial-politik Madinah, terdorong untuk ber-lomba-lomba saling unggul dalam hal garis keturunan dan silsilah. Suatu perubahan yang merupakan gerak kembali ke paham klan dan kesukuan Jahiliah itu pada banyak kalangan masyarakat Islam masih bertahan sampai sekarang. Penyimpangan itu telah menjadi pangkal berbagai kesulitan dan bencana dunia Islam, karena paham dinasti genealogis itu tanpa dapat dihindarkan disusul dan disertai oleh kezaliman despotik, otoriter dan totaliter di bidang sosial, politik, keagamaan, dan seterusnya.

Masyarakat Madinah itu, menurut Martin Lings, merupakan solusi Ilahi paling akhir bagi persoalan pemerintahan (*The most recent of Providence's solutions to the problem of government*). Masyarakat Madinah itu memang tidak berlangsung lama. Namun berkat pencatatan yang rinci oleh para ulama, sarjana dan kaum ahli, seperti dikatakan Martin Lings, masyarakat Madinah itu sampai sekarang tetap menjadi idaman, teladan dan pedoman. Semangat meneladani kembali Madinah itulah yang sampai sekarang memenuhi alam pikiran dan menjawai sepak terjang kaum Muslim yang sadar, karena, sejalan dengan penilaian Bellah, Madinah menjadi contoh komunitas nasional modern dan menjadi tipe nasionalisme partisipatoris egaliter. Maka jika kaum Muslim sampai sekarang tetap memandang contoh Madinah dengan penuh minat dan keyakinan, menurut Bellah, hal itu sama sekali bukanlah fabrikasi ideologis yang tidak historis.

Walaupun begitu, dalam kenyataan sekarang ini tidak mungkin mengingkari adanya salah paham yang negatif oleh sebagian kaum Muslim sendiri terhadap wawasan prinsipil Madinah, kemudian lebih-lebih lagi oleh orang lain di luar Islam. Disertai dengan keterbatasan kemampuan menggali kembali ajaran suci, khazanah kebudayaan dan sejarah, kesalahpahaman itu mendasari kemunculan dan penampilan sebagian masyarakat kita yang tidak produktif, bahkan kontra produktif. Oleh karena itu terdapat keperluan mendesak untuk menggali dan memahami kembali semangat Madinah itu dan menjabarkannya dalam kehidupan sedemikian rupa sehingga

ajaran kebenaran betul-betul menjadi wujud rahmat dan kasih-sayang Tuhan kepada seluruh umat manusia.

Ditarik relevansinya dengan masa sekarang, wawasan Madinah harus dikemukakan kembali sebagai tawaran tentang suatu sumber usaha mencari penyelesaian bagi permasalahan zaman modern. Hampir-hampir telah menjadi klise dan ucapan stereotipikal bahwa zaman modern telah berjalan pincang, karena kuatnya kedaulatan kuantitas, alias kehidupan kebendaan, dan lemahnya dimensi kualitas alias kehidupan keruahanian. Memang “urusan dunia” (*umur al-dunyā*) harus dikerjakan menurut hukum-hukum alamiahnya sendiri sebagaimana ditetapkan Allah dalam Sunnah-Nya. Tetapi “urusan dunia” yang sudah dikerjakan dengan cara seharusnya itu jika tidak disertai atas taqwa dan ridla Tuhan akan berkembang menjadi tidak lebih daripada fatamorgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Maka keunikan masyarakat Madinah tidak hanya segi pluralisme dan inklusivismenya semata. Keunikan masyarakat Madinah ialah bahwa semua itu, serta semua sendi kehidupan sosial-politiknya, didasarkan kepada atas taqwa dan ridla Allah, yaitu atas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam arti yang sebenar-benarnya.

Dalam peta luas krisis dunia modern, inti krisis pluralisme demokratis berpangkal pada pandangan bahwa ide-ide pokok yang mendasari keabsahan paham pluralisme demokratis itu disingkirkan dari wacana umum, apalagi jika ide-ide pokok itu bersumber pada ajaran keagamaan dan dijabarkan dalam semangat keagamaan. Dalam masyarakat kita terdapat ketakutan luar biasa kepada wacana kehidupan sosial umum yang bersifat keagamaan, dan sering diajukan argumen bahwa kita tidak mungkin bertanya dengan sungguh-sungguh apa makna keadilan atau dasar metafisis hak-hak asasi, dengan alasan bahwa kita adalah masyarakat majemuk. Tetapi sebenarnya kemajemukan serupa itu tidaklah sejati, karena ia menegaskan bahwa kita tidak mungkin melibatkan diri satu sama lain pada titik-titik perbedaan yang ada pada kita. Mungkin kita harus mengingatkan diri kembali bahwa apa yang sekarang ada di Amerika yang disebut “demokrasi sekuler” pun tumbuh dari

babit-babit perenungan keagamaan yang mendalam, yang dibawa oleh para imigran dari Eropa ke Amerika seperti yang kelak di sana diwakili oleh pandangan-pandangan George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams dan anaknya. John Quincy Adams, Alexander Hamilton, James Madison dan lain-lain. Sebagian dari mereka itu, seperti Thomas Jefferson dan Alexander Hamilton, memang mengaku tidak beragama formal atau beragama dalam arti menganut Deisme, Unitarianisme dan Universalisme, tetapi mereka juga sekaligus mengaku bahwa dalam hal wawasan moral dan etika pribadi dan sosial mereka peroleh dasar-dasar metafisisnya dalam ajaran-ajaran Isa al-Masih yang bagi mereka adalah guru agung budi pekerti luhur.

Mengingat dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang kita pegang teguh, gejala menghindar dari wacana umum keagamaan tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam semangat kemajemukan sebagaimana dikukuhkan dalam motto Bhinneka Tunggal Ika, kita harus berani melangkah lebih jauh daripada sekedar pengakuan pasif tentang adanya kemajemukan itu sendiri, dan harus memasuki arena pelibatan umum langsung dalam kemajemukan itu dengan kesadaran positif tentang adanya lingkaran batas-batas keadaban. Jika tidak demikian, maka jargon kemajemukan akan menjerumuskan kita ke dalam jebakan netralisme prosedural yang hampa makna.

Memang dalam keadaan aneka-ragam hakikat kebangsaan kita yang demikian besar sulit sekali bagi kita menemukan kesepakatan penuh dalam segala hal. Tetapi setidaknya kita harus berusaha dengan cukup kesungguhan untuk menemukan kosa kata yang sama atau mendekatkan satu sama lain dalam pandangan hidup umum. Hal itu berani bahwa masing-masing harus berusaha menemukan dalam khazanah budaya atau sejarahnya sesuatu yang secara metafisis memperkuat wawasan bersama dalam kehidupan umum itu, dengan menggali kembali babit-babit atau potensi-potensi dalam khazanah itu, bukan sekedar perubahan-perubahan eksternalnya; mempelajari kembali contoh-contoh sejarah, bukan sekedar pengalaman-pengalaman kontemporer. Kemudian semuanya itu diangkat ke dataran

generalisasi yang cukup tinggi sehingga menjadi bersifat universal-inklusif, berlaku untuk semua; tidak bersifat partikular-eksklusif, yang berlaku hanya untuk golongan khusus tertentu semata.

Maka jika ada sesuatu yang dapat dikemukakan dengan cukup mantap tentang Universitas Paramadina ialah bahwa kita insya Allah hendak ikut berusaha sebaik-baiknya untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan bangsa dalam mengembangkan wawasan Madinah menurut pengertiannya yang benar dan otentik. Dikaitkan dengan perkembangan global yang menyangkut bangsa kita saat sekarang, wawasan Madinah itu bersambung langsung dengan perjuangan mengembangkan masyarakat madani, *civil society*. Seorang pejuang *civil society* yang mencatat keberhasilan gemilang ialah Vaclac Havel. Cendekiawan (saat itu) Cekoslowakia yang kemudian menjadi Presiden itu menggambarkan masyarakat madani sebagai masyarakat yang dijiwai oleh “cita-rasa baik” (*good taste*), yang merupakan manifestasi nyata kepekaan manusia kepada dunia, lingkungan, dan rakyat. Havel berpikiran menuju ke arah terbentuknya semacam masyarakat madani global, yang menekankan kembali nilai-nilai yang tidak sering dikembangkan dalam politik dunia sekarang ini, yaitu keadaban, cita-rasa baik, kejujuran, dan, di atas semuanya, rasa tanggungjawab.

Pengertian *civil society* Havel itu mengarah kepada pengertian kemanusiaan suci primordial yang lebih menyeluruh, yaitu fitrahnya dari Tuhan. Dengan fitrah kesucian yang memancar dalam pola kehidupan umum itu kita mendapatkan segala kebaikan kemanusiaan seperti yang dicontohkan Nabi di Madinah. Oleh karena itu masyarakat Madinah menjadi tolok ukur peradaban, sehingga peradaban atau *civilization* disebut “madaniah” (*madaniyyah*), dan yang beradab atau *civil* adalah “madani” (*madani*). Pandangan hidup madaniah dan wawasan madani itu merambah dan meluas untuk meliputi seluruh segi kehidupan sosial dan politik. Dalam keseluruhan segi kehidupan itu, pandangan hidup madaniah dan wawasan madani memperoleh manifestasinya yang paling kuat dalam peperangan dan keadaan perang pada umumnya.

Kitab Suci memperingatkan kita bahwa salah satu wujud keutamaan budi ialah sikap teguh dan tabah dalam penderitaan, kesusahan dan masa-masa sulit (Q, 2:177). Maka peperangan harus ditujukan hanya kepada mereka yang bertindak agresif, dengan keteguhan jiwa dan sikap menahan diri, menghindari tindakan melewati batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas (Q, 2:190). Apalagi peperangan yang beradab itu memang diizinkan hanya untuk membela diri, dan bersama dengan itu juga untuk melindungi peradaban umat manusia, lebih-lebih peradaban keagamaan yang diwujudkan dalam pranata-pranata suci seperti biara, gereja, sinagog dan masjid sebagai tempat-tempat banyak diagungkan nama Tuhan dan dikembangkan nilai-nilai keagamaan (Q, 22:40). Karena itu ketika Khalifah Abu Bakar *ra* mengirim sebuah ekspedisi pembebasan, ia berpesan kepada komandannya, Yazid ibn Abi Sufyan, dengan sepuluh nuktah budi luhur dalam peperangan, yaitu “jangan membunuh perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia; jangan memotong pohon berbuah, meruntuhkan bangunan, membunuh binatang seperti kambing dan onta kecuali jika hendak dimakan; serta jangan merobohkan pohon kurma, dan jangan membakarnya; janganlah bersikap kikir, dan jangan pula curang” (Imam Malik dalam *Al-Muwaththa*).

Berkaca kepada petunjuk-petunjuk keagamaan itu, kita dapat merasakan betapa mendesaknya saat ini untuk menggali, menyadari dan meneladani masyarakat Madinah warisan Nabi. Wawasan Madinah itulah sepenting-penting Sunnah Nabi yang harus dihidupkan kembali. Dan wawasan Madinah itu pulalah sesungguhnya wujud utama Syari‘ah yang juga diwasiatkan Allah kepada semua nabi dan rasul yang wajib dilaksanakan dengan penuh keteguhan hati dan istiqamah, khususnya dengan peradaban kemanusiaan yang berpangkal pada ajaran kesucian manusia dan harkat dan martabatnya sebagai puncak ciptaan Tuhan dan yang Tuhan sendiri memuliakannya di daratan maupun di lautan (Q, 17:70). Kejahatan kepada seseorang adalah kejahatan kepada kemanusiaan universal, dan kebaikan kepada seseorang adalah juga kebaikan kepada kemanusiaan universal. “Barang siapa membunuh seorang jiwa tanpa

alasan kejahatan pembunuhan atau tindakan merusak di bumi, maka bagaikan ia membunuh umat manusia seluruhnya; dan barangsiapa menghidupi seorang jiwa maka bagaikan ia menghidupi umat manusia seluruhnya” (Q, 5:32).

Nilai-nilai Madinah itu diringkaskan dalam wasiat terakhir Nabi yang beliau sampaikan dengan seluruh ketulusan jiwa beliau dalam Pidato Perpisahan (*Khutbat al-Wadā'*), dengan inti pesan kesucian hidup, harta dan harkat manusia (*al-dimā' wa al-amwāl wa al-a 'radl* [*lives, properties, sacred honors*]). Dengan telah disampaikannya wasiat itu, di sore harinya, diwahyukan kepada Nabi bahwa Allah telah menyempurnakan agama umat manusia dan melengkapkan rahmat karunia-Nya, serta menyatakan agama Islam telah mendapat ridla atau perkenan-Nya. Inti wasiat Nabi itu diterima dengan tulus oleh seluruh kaum beriman, dan dilaksanakan hampir-hampir secara *taken for granted*, tanpa masalah. Inti wasiat Nabi itu menyebar ke kalangan umat-umat lain, dan tidak lama setelah terjadi kontak dunia Eropa dengan dunia Islam akibat perang Salib, inti wasiat Nabi itu merembes ke Eropa dan mempengaruhi perjalanan masyarakat di sana melalui falsafah kemanusiaan Giovani Pico della Mirandola. Bangsawan sekaligus hartawan dan ilmuwan dari Italia itu pada tahun 1486 menyampaikan orasi tentang harkat dan martabat manusia (*Oratio de hominis dignitate* [“Oration on the Dignity of Man”]) di depan kaum intelektual Eropa yang ia undang ke Roma. Diawali oleh falsafah kemanusiaan Pico pada akhir abad ke-15 itu ide hak-hak asasi manusia mulai berkembang di Eropa, yang sesampainya ke tangan John Locke hak-hak itu dirumuskan sekitar kesucian “hidup, kebebasan, dan harta” (“*life, liberty, and property*”). Pandangan-pandangan John Locke banyak mempengaruhi alam pikiran para bapak pendiri Amerika Serikat, khususnya mereka yang menganut Deisme, Unitarianisme dan Universalisme. Dan melalui pena Thomas Jefferson yang amat fasih, kita mendapatkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika rumusan nilai-nilai kesucian manusia sekitar “*life, liberty, and pursuit of happiness*,” yang pada kalimat terakhir Deklarasi itu rumusannya ditegaskan sebagai

“lives, fortunes, sacred honors,” persis seperti frasa Nabi dalam Pidato Perpisahan.

Sekarang nilai-nilai hak asasi manusia itu telah menjadi khazanah universal umat manusia. Namun berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi itu, apa yang kita saksikan di atas panggung sejarah dunia selama paling tidak sekitar setengah abad terakhir ini adalah tindakan-tindakan kejahanatan kemanusiaan yang paling buruk selama bumi terbentang: sejak genosida dan holokost di Eropa, terus ke bom atom di Jepang, dilanjutkan dengan bombardemen napalm atas Vietnam, pemberondongan senapan mesin terhadap orang-orang tak berdosa sewaktu mereka sembahyang dalam masjid Hebron di Palestina, dan seterusnya dan seterusnya sampai tak terhitung lagi, hingga akhirnya tidak lama yang lalu peristiwa tragis 11 September di Amerika.

Dan kembali ke tanah air kita sendiri, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang tindakan kekejaman kemanusiaan yang memberi kesan betapa murahnya harga nyawa manusia di bagian bumi ini. Jika kita perhatikan berbagai bentuk kejahanatan kemanusiaan yang terjadi di tanah air, kita jadi bertanya-tanya, ke manakah gerangan dasar negara “Perikemanusiaan yang adil dan beradab” itu pergi dan lenyap dari kesadaran kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Perikemanusiaan adalah prinsip kita dalam kehidupan berbangsa, dan bangsa yang melanggar prinsipnya sendiri tidak akan bertahan (*a nation against its own principle will never stand*).

Sudah tentu kita dapat memperkirakan apa sebab-musababnya, yaitu terjadinya pembangunan bangsa yang tertunda pada negara kita, akibat deretan panjang beberapa kebijakan nasional pemerintah dalam sejarah Republik kita yang sebagiannya salah arah dan menyimpang dari tujuan kita bernegara, “menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Tekanan yang terlalu berat kepada pembangunan ekonomi, namun tidak disertai pembangunan etika dan moral pribadi dan sosial melalui keteladanan para pemimpin telah menjerumuskan sebagian anggota masyarakat kita kepada pandangan hidup hedonistik, enak-kepenak, dengan obsesi bagaimana mengumpulkan kekayaan pribadi sesingkat-singkatnya

dan semudah-mudahnya, menempuh jalan pintas tanpa peduli kepada hukum dan kepada norma-norma etika dan moral. Di tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat yang mencekam, ada segolongan masyarakat kita yang fasik, yang dengan penuh kebanggaan memamerkan kekayaan dan kemewahan. Akibatnya ialah tumbuhnya jurang perbedaan yang menganga antara golongan kecil yang kaya dan super kaya pada satu pihak dan rakyat umum yang melarat hidup nestapa pada perihal lain. Inilah perlawanan prinsipil terhadap asas keadilan sosial. Inilah kezaliman yang menjadi pemicu segala rupa tindakan perusakan akibat kekecewaan dan putus asa. Inilah tanda zaman bagi hancurnya sebuah bangsa, dengan akibat-akibat mengerikan yang saat ini belum bisa diperkirakan.

Dilihat dari sejarah perkembangan konsep-konsepnya memang bangsa kita sekarang ini dapat dikata masih di tengah proses pertumbuhan dan penjadinya. Indonesia adalah suatu bangsa yang sedang menjadi, *a nation in making*. Sejak para pembangun kebangsaan modern memulai gagasan mereka awal abad yang lalu, proses pencarian akan hakikat kebangsaan kita telah bersemi. Mula-mula mereka meminjam istilah ilmu sosial dan kebahasaan "Indonesia" buatan ilmuwan Jerman Adolf Bastian (1864) untuk menjadi alat identifikasi dan nama bagi keseluruhan bangsa yang mereka dambakan. Kemudian mereka mengangkat bahasa Melayu dialek Riau sebagai bahasa persatuan bagi seluruh unsur kebangsaan yang beraneka ragam, suatu bahasa yang telah tumbuh sejak zaman Sriwijaya dan menjadi lingua franca Austronesia, yang kemudian dikembangkan oleh Aceh menjadi bahasa literer, dan mengalami pembakuan klasik di Riau dengan kontribusi dari banyak tokoh yang berasal dari berbagai suku, dan akhirnya digarap lebih lanjut oleh para cendekiawan modern, khususnya dari Sumatera Barat. Kini kita mewarisi sebuah bahasa modern, Bahasa Indonesia. Inilah aset kebangsaan kita yang paling penting, paling nyata dan paling menentukan. Jika kita punya cukup alasan bahwa bangsa kita tidak akan pecah berantakan, sebagian besar adalah karena suksesnya kita mengembangkan bahasa nasional itu, paling sukses di antara semua bangsa baru yang muncul setelah Perang Dunia II. Tetapi alasan

optimisme berdasarkan adanya bahasa persatuan tentu tidak akan menjadi jaminan mutlak. Yang akan lebih menjamin masa depan kita ialah pelaksanaan sungguh-sungguh tujuan negara menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan penerapan yang bijak dan konsisten prinsip kemajemukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Keadilan sosial adalah kurang-lebih padanan pemerataan. Kemajemukan adalah kurang-lebih padanan pengakuan dan pemberian ruang kepada berbagai golongan dan daerah untuk mengembangkan diri menurut pandangan dan pola budaya masing-masing, dalam bingkai kesatuan keindonesiaan. Tetapi yang sekarang ini kita saksikan dan alami adalah warisan gejala kesenjangan di berbagai bidang kehidupan, khususnya kesenjangan ekonomi berupa jurang pemisah antara kelompok kecil yang kaya dan rakyat umum yang miskin-papa, yang dalam gabungannya dengan kesenjangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan wilayah kita menyaksikan jurang pemisah yang sedemikian lebar antara pusat dan daerah. Nafsu memusatkan kekuasaan pada kalangan elite terbatas telah mendorong terjadinya proses sentralisme dan sentralisasi yang sangat berlebihan, di bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan seterusnya. Akibat negatif sampingannya ialah hilangnya kemampuan mengambil inisiatif dari bawah, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat kelompok dan wilayah. Karena telah terbiasa dengan proses-proses “*top down*” dalam kehidupan nasional, sebagian besar masyarakat tumbuh dalam mentalitas selalu menunggu penyelesaian dari atas, suatu bentuk “*bottle-feeding effect*.”

Namun akhirnya syukur kepada Tuhan, bangsa kita mulai bergeser dari tingkat “*a nation in making*” naik ke tingkat “*a nation coming of age*,” suatu bangsa yang sedang berkembang menuju ke tingkat kedewasaan. Pandangan yang bernada penuh harapan itu didasarkan kepada keberhasilan gerakan Reformasi, yang telah membawa bantahan kepada bangsa kita berupa kebebasan-kebebasan sipil (*civil liberties*), yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Dan yang lang-

sung terkait dengan lembaga ini, lembaga pendidikan tinggi, ialah kebebasan akademik. Seperti halnya dengan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan beribadat, kebebasan akademik adalah karakteristik esensial masyarakat demokratis. (*Academic freedom ranks with freedom of speech, freedom of the press, and freedom of worship as an essential characteristic of democratic society*).

Civil liberties itulah aset teramat penting bangsa kita dalam tahap perkembangannya sekarang ini. Itulah tumpuan harapan paling utama bahwa bangsa kita akan mampu mewujudkan cita-citanya, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam bingkai sebuah negara kebangsaan modern yang berdaulat (*sovereign modern nation state*). Dengan kebebasan-kebebasan sipil itu dalam masyarakat kita, dapat diharapkan akan berkembang mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*checks and balances*), yang membuat semua kegiatan dan kenyataan oleh siapapun dan menyangkut siapa pun tidak akan terbiarkan berlangsung dengan merugikan warga masyarakat, karena semuanya akan terbeber dalam wacana umum yang bebas. Dengan *civil liberties* itu, proses-proses dalam masyarakat yang menyangkut kehidupan umum akan berlangsung transparan, *accountable*, dan *auditible*.

Juga dengan adanya *civil liberties* itu kita, insya Allah, akan menyaksikan tumbuhnya kemampuan masyarakat luas untuk ambil inisiatif-inisiatif, yang akan mendorong tingkat produktifitas mereka. Di bidang ilmu pengetahuan, kita juga, insya Allah, akan menyaksikan perkembangan kreativitas ilmiah umum, sehingga akan besar sekali peranannya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia kita.

Sudah saatnya kita segera mengakhiri praktek-praktek kejahatan sosial seperti korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan harta publik lainnya. Dengan modal *civil liberties* kita harus menyingsingkan lengan baju, cancut *tali wondo*, memulai kehidupan nasional baru yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih terarah dan lebih berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nasional “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), insya Allah. Tetapi untuk itu kita harus mulai dengan sungguh memperjuangkan nasib rakyat. Se-

bagian dari mereka telah tertindas sejak zaman kolonial, dan dalam zaman kemerdekaan pun mereka selalu terkena diskualifikasi setiap kali terjadi konsolidasi negara dan pemerintahan. Sebabnya ialah tingkat pendidikan yang masih rendah, padahal mereka lah yang paling berkorban melawan penjajah sejak mereka datang ke bagian bumi ini, dan di masa-masa mereka butuh kemerdekaan dan mempertahankannya. Mereka adalah batu sudut bangunan Republik kita yang dilupakan oleh para pembangunnya sendiri (*the corner stone of the house neglected by the builders*). Karena itu mereka tumbuh dengan gumpalan rasa kecewa yang membara, yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam tindakan-tindakan kekerasan.

Demikian pula halnya dengan daerah-daerah, demi keadilan sosial dan demi semangat Bhineka Tunggal Ika, kita harus memberi pengakuan dan penghargaan kepada semuanya dengan pelaksanaan sungguh-sungguh desentralisasi dan otonomisasi. Sebagian daerah-daerah itu telah memainkan peranan sejarah yang amat menentukan bagi bangunnya Republik, seperti Aceh yang oleh Bung Karno dengan penuh penghargaan disebut “Daerah Modal.” Namun telah sekian lama mereka merasa terabaikan, lagi-lagi adalah sebuah kasus *“the corner stone of the house neglected by the builders.”* Banyak pula dari daerah-daerah itu yang berperan sebagai penyumbang utama kekayaan nasional, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Namun lagi-lagi untuk sekian lama mereka diingkari, sebuah kejadian lain kasus *“the corner stones of the house neglected by the builders.”*

Kita tidak mungkin berketerusan menjalani kehidupan nasional yang penuh dengan kezaliman sosial serupa itu. Jika kita teruskan juga, maka kezaliman sosial itulah jaminan paling pasti bahwa bangsa kita akan bubar dan negara kita akan ambruk berantakan.

Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertekad memulai kehidupan nasional baru, dengan patriotisme baru, yang menuntut semua kita untuk hidup prihatin, menunda kesenangan, mengingkari diri sendiri (*self-denial*), dalam semangat setia kawan kepada rakyat yang masih sangat menderita kemiskinan dan kemelaratan. Paling tidak, kita memerlukan jangka waktu satu generasi untuk

membangun bangsa ini sebelum Indonesia tampil sebagai negara demokratis ketiga terbesar di muka bumi, sebuah masyarakat yang adil, terbuka, bebas dan egaliter, dengan ridla Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Itulah wawasan masyarakat Madinah yang harus kita junjung bersama, masyarakat madani, *civil society*. Insya Allah.

Wa’Llāh a’lam bi’l-shawāb. ♦♦